MENELISIK KETEGASAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI PAKISTAN

Sabarudin Ahmad

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Email: sabarudin.ahmad@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Penerapan hukum keluarga di Pakistan terbilang yang paling tegas dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Keberadaan sanksi-sanksi dalam ranah hukum keluarga menunjukkan keberanian dan merupakan sebuah pembaruan hukum yang progresif. Permasalahannya ialah bagaimana historisitas negara Pakistan dan bagaimana ketegasan hukum keluarga Islam di Pakistan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan hukum Islam, serta dianalisis menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam di Pakistan, khususnya hukum keluarga mengalami pembaharuan hukum. Hukum keluarga diatur dalam The Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961 yang mengatur hukum keluarga, di antaranya mengatur masalah batas usia nikah, pencatatan pernikahan, maskawin, poligami, dan proses perceraian. Semua ketentuan ini diatur dengan ketat dan masing-masing memiliki sanksi pidana bagi yang melanggarnya, inilah bentuk ketegasan hukum keluarga di Pakistan.

Kata Kunci: hukum keluarga, Islam, dan Pakistan.

A. Pendahuluan

Perkembangan hukum Islam di dunia Islam bergerak dinamis dari waktu ke waktu, tidak terkecuali di Pakistan. Negara ini merupakan negara Islam¹ yang tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaannya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Begitu kuatnya dorongan dari warga muslim untuk terus memperjuangkan negara Islam, akhirnya membuahkan hasil, tepatnya pada tahun 1947 negara Republik Islam Pakistan resmi berdiri.

Sebagai negara Islam, konstitusi dibentuk berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kentalnya nilai-nilai keislaman yang diterapkan di Pakistan telah berlangsung cukup lama, bahkan sejak negara ini masih menjadi bagian dari negara India. Sehingga keberadaan hukum Islam terbilang mapan, meskipun sebagaimana halnya kebanyakan negara Islam lainnya, yang masih berkuat pada masalah hukum perdata belum ke ranah pidana.

¹Negara Islam berbeda dengan negara berpenduduk mayoritas muslim. Negara Islam adalah negara yang konstitusinya berlandaskan Islam. Negara Islam juga bukan negara kaum agamawan, seperti yang disangkakan oleh para kaum orientalis Barat. Menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa negara Islam adalah negara madani yang berlandaskan Islam, ditegakkan berdasarkan ba'iat dan musyawarah, pemimpinya dipilih dari kalangan orang jujur, kuat dan terpercaya, serta penuh perhatian. Lihat Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Negara*, judul aslinya *Min Fiqh ad-Daulah fil-Islam Mankanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atahu, Manqifuha min ad-Dimaqratiyah wa at-Ta'addudiyah wal-Maar'ah wa Khairul Muslimin*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta: Robbani Press, 1997, h. 29. Bandingkan dengan Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: IndonesiaTera, 2001, h. 39-48.

Perkembangan hukum Islam di Pakistan sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya dalam lingkup hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga terbilang yang paling tegas dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Hal ini terlihat dengan keberadaan sanksi-sanksi dalam perkara-perkara hukum keluarga. Seseorang yang berpoligami tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku dapat dipidana penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5000 rupee.² Menarik untuk ditelisik lebih dalam ketentuan-ketentuan tersebut dari segi filosofis, yuridis, dan efektifitasnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Ada perbedaan mendasar antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris, terutama pada langkah-langkah teknis yang dilakukan. Penelitian hukum normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis pada peristiwa hukum, sedangkan penelitian hukum empiris menekankan pada fakta sosial melalui langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris.³ Bahan-bahan yang digunakan bersumber dari bahan kepustakaan, dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).⁴ Selain itu, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan⁵ dan pendekatan hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

1. Historisitas Negara Pakistan

Pakistan dengan nama resminya Republik Islam Pakistan (*Islami Jumhuriyah yi Pakistan*; bahasa Urdu) terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan Iran dan Afganistan di bagian barat, India di bagian timur, dan China di arah timur laut. Luas wilayahnya 796.095 km² Penduduknya pada tahun 2015 berjumlah 191.275.591 orang, dengan kepadatan 237,4/km².⁶ Pakistan

²Rahmat Yudistiawan, "Hukum Keluarga Islam di Pakistan", Makalah, h. 6. Lihat <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/hukum-keluarga-islam-di-pakistan/> (online 29 Maret 2016)

³Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif; Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 2.

⁴Analisis isi merupakan suatu analisis mendalam dengan menggunakan teknik kuantitatif maupun teknik kualitatif terhadap bahan-bahannya. Tentunya dengan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variabel yang dapat diukur atau konteks dari data yang disajikan. Lihat Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 283-284.

⁵Pendekatan perundang-undangan dalam penggunaannya harus memahami hierarki, dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 133-137. Pendekatan perundang-undangan juga selaras dengan penelitian dogmatik hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah untuk mempelajari suatu tatanan hukum positif tertentu dengan memfokuskan pada norma-norma hukum positif tertentu, dan terbebas dari sistem-sistem lainnya tanpa menggunakan pengetahuan empiris. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012, h. 37.

⁶Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan> (online 11 April 2016)

memiliki letak yang strategis di antara daerah-daerah penting di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah.

Wilayah Pakistan saat ini merupakan situs dari kebudayaan kuno seperti budaya Neolitik, Mehrgarh dan Peradaban Lembah Sungai Hindus. Merupakan bagian dari sejarah Veda, Persia, Indo-Yunani, Peradaban Islam, dinasti Turki Mongol dan kebudayaan Sikh. Akibatnya, Pakistan memiliki berbagai peninggalan berbagai dinasti seperti dinasti Persia, Khalifah Umayyah, kekaisaran Maurya, kekaisaran Mongol, Kesultanan Mughal, kesultanan Sikh, dan terakhir imperialisme Inggris.⁷

Penduduk Pakistan mayoritas beragama Islam dengan presentasi Islam 97% (sebagian besar beraliran Sunni, sisanya beraliran Syiah dan Ahmadiyah), sisanya beragama Kristen, Hindu, dan lainnya. Bahasa yang digunakan adalah urdu, sind, punjabi, pushtu, dan Inggris.⁸ Dengan jumlah muslim sebanyak ini, menempatkan Pakistan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar kedua setelah Indonesia.⁹

Negara Pakistan berdirinya dan memisahkan diri dari India pada tahun 1947.¹⁰ Pemisahan ini terjadi akibat dari kecemasan warga muslim terhadap dominasi warga Hindu. Pada saat itu India masih dijajah oleh Inggris, sehingga menjadi santapan umpuk untuk memecah belah warga India. Sebagaimana dikatakan Ira Lapidus:

Pihak Inggris berusaha menemukan langkah kompromi –pidato Simon tahun 1930 mendukung sebuah pemerintahan federal bagi India, Kertas Putih tahun 1932 menegaskan wilayah pemilihan yang terpisah tetapi mencabut parlementer mayoritas Muslim di Bengal dan Punjab, dan Perundangan Pemerintah India tahun 1935 yang membriikan jaminan Inggris terhadap hak-hak minoritas tetapi memperbesar monopoli yang menguntungkan pihak mayoritas Hindu- semuanya ditolak lantaran tidak sepadan dengan tuntutan sepihak atau bagi pihak lain dan lantaran hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena beberapa rancangan tersebut memperkokoh kelangsungan pemerintahan Inggris di India.¹¹

⁷*Ibid.*

⁸Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 47.

⁹Lihat Wikipedia. Urutan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia adalah 1) Indonesia, 2) Pakistan, 3) India, 4) Bangladesh, 5) Mesir, 6) Nigeria, 7) Iran, 8) Turki, 9) Algeria, 10) Maroko. Lihat juga Angga Indrawan, *Inilah 10 Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia*, m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia, (online 12 April 2016)

¹⁰Negara Pakistan merupakan negara Islam kedua yang memerdekakan diri dari penjajahan. Sebelumnya, Indonesia lebih dulu merdeka pada tahun 1945. Kemerdekaan Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947, ketika Inggris menyerahkan kedaulatannya di India kepada dua Dewan Konstitusi, satu untuk India dan satu untuk Pakistan. Presiden pertamanya adalah Ali Jinnah. Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h. 188.

¹¹Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, h. 291.

Selanjutnya pada tahun 1938, Liga Muslim yang dipimpin oleh Ali Jinnah menyampaikan teori dua bangsa. Dan secara resmi menyampaikan tuntutan sebuah tanah air Muslim yang terpisah. Pada tahun 1945 resolusi pemisahan diri semakin bergemuruh. Akhirnya pada tahun 1947 Liga Muslim ini secara resmi memisahkan diri dari India dengan nama negara Republik Islam Pakistan.¹²

Namun, perjuangan warga muslim di Pakistan tidak berarti telah usai. Bahkan setelah negara ini resmi merdeka pada tahun 1947, ternyata permasalahan politik Pakistan terus berkejolak. Bahkan nama negara Republik Islam Pakistan, pada tahun 1962, kata Islam sempat ditanggalkan, sehingga menjadi negara Republik Pakistan. Namun protes keras dari warganya membuat pemerintahan kembali menggunakan Republik Islam Pakistan.¹³

Pakistan merupakan salah satu negara dengan mayoritas berpenduduk muslim. Negara ini sebagaimana negara-negara Islam lainnya juga ikut serta dalam melakukan pembaharuan hukum, khususnya dalam masalah hukum keluarga.¹⁴ Sebagaimana dikatakan Tahir Mahmood dalam Muhammad Amin Summa mengatakan bahwa:

...Antara tahun 1920 dan 1946, Mesir mulai mengadakan reformasi sedikit demi sedikit, dengan menggunakan (perpaduan/koalisi) mazhab Hanafi-Syafi'i, yang kemudian diikuti oleh masyarakatnya. Sedangkan negara-negara lain yang telah melakukan hal serupa adalah Sudan, Jordan, Syria, Tunisia, Maroko, Algeria, Irak, Iran dan Pakistan.¹⁵

Pembaharuan hukum Islam khususnya hukum keluarga di negara-negara Islam maupun di negara-negara mayoritas muslim didorong oleh beberapa hal. Di antara hal tersebut adalah, pertama, negara yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum keluarga. Hal ini dilakukan karena negara tersebut menganut beberapa mazhab fikih. Kedua, pembaharuan dilakukan untuk mengangkat status wanita. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, namun dapat dilihat dalam sejarah munculnya untuk merespon tuntutan peningkatan status

¹²Upaya warga muslim untuk memisahkan diri dari India sebenarnya dari warga muslim sendiri terdapat perbedaan. Di satu sisi Liga Muslim menginginkan berdirinya negara muslim yang terpisah. Pada posisi lain, dari Jami'ah al-Ulama'i Hindi menginginkan negara kesatuan India, yang mana warga muslim pada satu posisi haruslah menjadi seorang muslim, sedangkan pada sisi lain sebagai satu bangsa haruslah dapat hidup berdampingan dengan nonmuslim. Lihat *Ibid.*, h. 294-298.

¹³Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990, h. 228.

¹⁴Pembaharuan hukum adalah sebuah keniscayaan. Sebagai syariat terakhir, Islam dituntut agar hukum-hukumnya bisa diterapkan pada setiap saat dan tempat, pada setiap kondisi dan situasi dengan perkembangan dan perubahan kemasyarakatan umat. Dengan memerhatikan sumber-sumber hukum Islam, ternyata dapat berlaku dan diberlakukan pada setiap tempat, zaman, situasi, dan kondisi, selama masih berkisar pada batas-batas maslahat dan manfaat. Lihat Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 29.

¹⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, h. 164.

wanita. Ketiga, pembaharuan dilakukan untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman. Karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya.¹⁶

Dalam sejarahnya, perkembangan dan pembaharuan hukum Islam di Pakistan terjadi tarik menarik antara hukum Islam yang dirumuskan oleh pemerintah dengan hukum Islam yang diinterpretasikan oleh masyarakat.¹⁷ Gejolak ini merupakan hal yang umum terjadi pada negara yang baru berdiri. Bahkan gejolak sebagai negara baru, pada perjalanan negara Pakistan terpecah lagi menjadi Pakistan timur atau disebut negara Bangladesh.

2. Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakistan

Hukum Islam di Pakistan, khususnya hukum keluarga sebagaimana telah disinggung sebelumnya, memiliki sejarah yang panjang. Bahkan sebelum Pakistan memisahkan diri dari India, hukum keluarga telah diatur. Dalam perkembangannya setelah merdeka, hukum keluarga mengalami pembaharuan. Hukum keluarga kemudian diatur dalam The Family Law Ordinance tahun 1961. Sebagaimana dikatakan oleh Mardiani:

Pembaharuan hukum keluarga Pakistan terjelma dalam kitab Mudawwanah al-ahwal al-syakhsyiyah atau dikenal dengan Muslim Family Laws Ordinance (MF LO) tahun 1961. Undang-undang ini adalah hasil kerja suatu komisi yang mensurvei kebutuhan hukum keluarga masyarakat sekaligus menambah dan merevisi bagian-bagian undang-undang hukum keluarga yang telah ada sebelumnya.¹⁸

Di dalam ordonansi ini terdapat beberapa hal yang diatur. Dalam makalah ini hanya membahas mengenai batas usia nikah, pencatatan pernikahan, maskawin dan biaya pernikahan, poligami, dan ketentuan perceraian.

1. Batas usia nikah

Hukum keluarga Islam di Pakistan, mengenai batas usia nikah diatur dengan tegas dan ketat. Bahkan mengandung sanksi pidana. Sebagaimana dikatakan Nasaruddin Umar:

Di Pakistan, terhadap pria (berumur di atas 18 tahun) yang menikahi anak di bawah usia nikah, dapat dihukum penjara maksimal 1 bulan; atau denda maksimal 1000 rupee; atau keduanya sekaligus. Sanksi yang sama juga akan dijatuhkan kepada pihak yang menyelenggarakan; memerintahkan; atau memimpin pernikahan mempelai di bawah umur (nikah). Demikian pula terhadap mereka (setiap pria baik sebagai orang tua atau wali atau pihak lain yang punya kapasitas/ berhak menurut hukum atau tidak) yang menganjurkan; atau mengizinkan dilangsungkannya pernikahan; atau lalai mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Sedangkan terhadap setiap pihak (pria) yang enggan mematuhi keputusan yang dikeluarkan Pengadilan (terkait pernikahan di bawah umur) sementara ia tahu keputusan tersebut

¹⁶M. Atho Muzdhar dan Khairuddin, *Hukum Keluarga di dunia Islam modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, h. 11.

¹⁷Mardani, *Hukum Perkawinan*, h. 48.

¹⁸*Ibid.*

melarang perbuatan yang dilakukannya dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 bulan.¹⁹

Pengaturan tersebut tidak jauh berbeda dengan batas usia nikah di Indonesia. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”²⁰

Perbedaan mendasar dari kedua hukum tersebut terletak pada sanksinya. Di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai sanksi terhadap perkawinan di bawah usia tersebut. Bahkan dalam UU Perkawinan membolehkan pernikahan sebelum usia tersebut dengan syarat mengajukan dispensasi nikah. Keberadaan sanksi tersebut menunjukkan sebuah pembaruan hukum di Pakistan.

2. Pencatatan Pernikahan

Menurut Rahmat Yudistira bahwa dalam Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961, Pakistan mengharuskan pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Penetapan ini didasarkan atas pendapat Imam Hanafi yang melandaskan pendapatnya kepada ayat Al-Quran tentang pentingnya mencatat transaksi-transaksi penting. Ulama tradisional Pakistan juga setuju dengan keharusan pencatatan perkawinan, dengan syarat tidak dijadikan syarat sah perkawinan. Bagi yang melanggar aturan ini dihukum dengan hukuman penjara selama 3 bulan dan/atau denda 1000 Rupee.²¹ Pencatatan pernikahan di Pakistan seperti halnya di Indonesia, merupakan syarat administrasi. Dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana.

3. Maskawin

Dalam The Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961 menentukan mengenai maskawin atau mahar. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Sainul berikut:

Di antara isi UU batasan Mahar Pakistan, pasal 3 disebutkan, bahwa jumlah maksimal mahar adalah 5000 rupee, Pasal 4, hadiah/kado yang boleh diberikan tidak lebih 1000 rupee, dan para pejabat Negara tidak boleh menerima hadiah/kado untuk perkawinan anaknya (laki-laki atau perempuan), yang pemberiannya berhubungan dengan jabatan; Pasal 5, semua hak yang diberikan sebagai mahar, pemberian yang berhubungan dengan perkawinan, atau hadiah (kado) yang diberikan menjadi hak mutlak isteri, dan

¹⁹Nasaruddin Umar, *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara Muslim*, h. 11. disampaikan pada acara Seminar Nasional Hukum Materil Peradilan Agama, antara cita, realita dan harapan, Hotel Red Top Jakarta 19 Februari 2010, lihat <http://dokumen.tips/documents/makalah-dirjen-bimas-islam-hukum-keluarga-kontemporer-di-negara-muslim.html> (online 29 Maret 2016)

²⁰*Kompilasi Hukum Islam Indonesia & Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Trinity, 2007, h. 92.

²¹Rahmat Yudistiawan, “*Hukum Keluarga Islam di Pakistan*”, Makalah h. 7. Lihat <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/hukum-keluarga-islam-di-pakistan/> (online 29 Maret 2016)

untuk kepentingannya tidak boleh dibatasi dengan sesuatu apapun; Pasal 6, jumlah mahar dan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan perkawinan (seperti untuk upacara walimah dan semacamnya) tidak boleh lebih dari 2500 rupee; pasal 8, bapak atau yang mewakilinya, dalam waktu 15 hari setelah akad nikah harus melaporkan kepada Pegawai Pencatat tentang jumlah yang dihabiskan untuk perkawinan yang bersangkutan; Pasal 9, seorang yang melanggar aturan yang ada dalam UU ini dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan.²²

Ketentuan tersebut terlihat sangat ketat. Maskawin dibatasi jumlahnya, bahkan untuk acara walimah perkawinan pun dibatasi. Hal ini barangkali karena pemerintah tidak menginginkan pernikahan dilakukan secara berlebihan, atau perkawinan dapat memberatkan pihak calon suami.

4. Poligami

Ketentuan poligami di Pakistan diatur dalam The Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961. Sebagaimana dikatakan Rahmat Yudistiawan sebagai berikut:

1. No man, during the subsistence of an existing marriage, shall except with the previous permission in writing of the Arbitration Council, contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this Ordinance.
2. An application for permission under Sub-section (1) shall be submitted to the Chairman in the prescribed manner together with the prescribed fee, and shall state reasons for the proposed marriage, and whether the consent of existing wife or wives has been obtained thereto.
3. On receipt of the application under Sub-section (3), Chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative, and the Arbitration Council so constituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant, subject to such condition if any, as may be deemed fit, the permission applied for.
4. In deciding the application the Arbitration Council shall record its reasons for the decision and any party may, in the prescribed manner, within the prescribed period, and on payment of the prescribed fee, prefer an application for revision to the Collector concerned and his decision shall be final and shall not be called in question in any Court.
5. Any man who contracts another marriage without the permission of the Arbitration Council shall,
 - a. Pay immediately the entire amount of the dower whether prompt or deferred, due the existing wife or wives, which amount, if not so paid, shall be recoverable as arrears of land revenue, and
 - b. On conviction upon complaint be punishable with the simple imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.²³

²²Ahmad Sainul, *Undang-Undang Mahar Pakistan ditinjau dari Fiqih Munakahat*, lihat <http://notesnasution.blogspot.co.id/2014/12/ahmad-sainul-mahar-pakistan.html> (online 29 Maret 2016)

²³Zafar Iqbal Kalanauri, *Concept of Polygamy in Islam and Law in Pakistan*, h. 4. <http://www.zklawassociates.com/wp-content/uploads/2012/03/CONCEPT-OF-POLYGAMY-IN-ISLAM-AND-LAW-IN-PAKISTAN.pdf>

Poligami di Pakistan juga diatur dengan ketat dan mengandung sanksi pidana. Poligami tidak dapat dilakukan secara ilegal. Poligami harus izin terlebih dulu kepada Dewan Arbitrase. Jika dilakukan tanpa izin akan dikenakan sanksi pidana.

5. Proses perceraian

Di Pakistan, seorang suami masih dapat menjatuhkan talak secara sepihak di luar pengadilan, tetapi segera setelah itu ia diwajibkan melaporkannya kepada pejabat pencatat perceraian yang kemudian akan membentuk Dewan Hakam (Arbitrasi) untuk menengahi dan mendamaikan kembali pasangan suami istri itu. Jika setelah 90 hari (3 bulan) usaha perdamaian itu gagal maka talak itu berlaku.²⁴ Secara lebih rinci Rahmat Yudistiawan mengatakan:

Pakistan masih mengakui perceraian di luar pengadilan, sesuai dengan MFLO (The Muslim Family Laws Ordinance) Tahun 1961 pasal 7 ayat 1, “Seorang yang menceraikan istrinya, segera setelah ikrar talak harus membuat laporan tertulis kepada ketua Arbitration Council’, dan satu copy dikirim ke istrinya”. Pasal 7 ayat 2, “Bagi seorang yang melanggar ayat 1 pasal ini dapat dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun atau denda 5.000 Rupee atau kedua-duanya”.²⁵

Kemudian dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan talak, Dewan Arbitrase mengambil langkah-langkah untuk membawa rekonsiliasi antara suami dan istri. Jikalau disaat upaya tersebut untuk menegosiasi gagal dan permasalahan belum terselesaikan, maka berlaku baginya waktu sembilan puluh hari dari setelah berakhirnya hari di mana pemberitahuan penolakan talak pertama kali disampaikan kepada ketua. Namun, jika istri sedang hamil pada saat pembacaan talak, talak tersebut tidak berpengaruh sampai sembilan puluh hari telah berlalu atau akhir kehamilan, mana yang lebih dulu.²⁶

Ketentuan mengenai perceraian di Pakistan masih mengenal talak di luar pengadilan. Hanya saja, talak tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Arbitrase untuk diproses. Selain itu, istri juga dapat menggugat cerai suaminya dengan alasan tertentu. Di antaranya sebagaimana dikatakan Rahmat Yudistiawan:

Sebagai tambahan, berdasarkan The Dissolution Of Muslim Marriage Act 1939, yang diperbarui tahun 1961, menunjukkan bahwa seorang suami yang ingin melakukan poligami dapat menjadi alasan perceraian. MFLO Tahun 1961 pasal 2, “Seorang istri dapat minta cerai karena (ii-a) karena suami nikah lagi dengan seorang wanita dengan cara yang tidak sejalan dengan aturan MFLO, 1961.” Kemudian pula istri yang dimadu, boleh meminta cerai dengan alasan suaminya tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam MFLO tahun 1961 pasal 2 (viii [f]), “Seorang istri dapat minta cerai karena (viii [f]) suami yang poligami tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya.”

²⁴Rahmat, *Hukum Keluarga*, h. 8..

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.* h. 9

Demikian beberapa ketentuan mengenai hukum keluarga di Pakistan. Secara keseluruhan telah terdapat beberapa pembaharuan hukum, dari hukum tradisional klasik kepada hukum yang disesuaikan dengan tuntutan zaman dan keadaan. Pembaruan yang mencolok di Pakistan adalah munculnya sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam hukum, meskipun dalam lingkup hukum keluarga.

Hukum keluarga di Pakistan dalam kenyataannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam makalah ini terbatas hanya membahas dalam Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebagai gambaran saja penulis paparkan beberapa peraturan perundang-undangan hukum keluarga lainnya di Pakistan di bawah ini:

1. Act penerapan shari'ah 1962.
2. Act negara federal tentang mahar dan hadiah penggantian 1976 dan amandemennya yaitu ordnansi mahar dan hadiah pengantin 1980.
3. Undang-undang wakaf tahun 1979.
4. Konstitusi 1985 tentang operasional dan efektifitas peradilan syariah federal dan peradilan banding.
5. Reform and Protection of Personal Laws 1947-1987.²⁷

B. Kesimpulan

Negara Republik Islam Pakistan berdiri pada tahun 1947. Negara ini merupakan negara Islam, dengan jumlah penduduk muslimnya mencapai 97%. Pakistan dalam perjalanannya memiliki sejarah yang panjang. Gejolak politik terus terjadi. Namun, berkat warganya yang kuat dengan pendiriannya untuk terus mempertahankan kedualatan negara Islam Pakistan. Bahkan, saat ini Pakistan merupakan negara dengan populasi muslim terbesar kedua setelah Indonesia.

Hukum Islam di Pakistan, khususnya hukum keluarga mengalami pembaharuan hukum. Hukum keluarga diatur dalam The Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961 yang mengatur hukum keluarga, di antaranya mengatur masalah batas usia nikah, pencatatan pernikahan, maskawin, poligami, dan proses perceraian. Semua ketentuan ini diatur dengan ketat dan masing-masing memiliki sanksi pidana bagi yang melanggarnya, inilah bentuk ketegasan hukum keluarga di Pakistan.

²⁷Mardiani, *Hukum Perkawinan*, h. 48.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrawan, Angga, *Inilah 10 Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia*, m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia, (online 12 April 2016)
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: IndonesiaTera, 2001.
- Kalanauri, Zafar Iqbal, *Concept of Poligamy in Islam and Law in Pakistan*, <http://www.zklawassociates.com/wp-content/uploads/2012/03/concept-of-polygamy-in-islam-and-law-in-pakistan.pdf>
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia & Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Trinity, 2007.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Ummat Islam*, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muzdhar, M. Atho dan Khairuddin, *Hukum Keluarga di dunia Islam modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Negara*, judul aslinya *Min Fiqh ad-Daulah fil-Islam Mankanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atahu, Manqifuha min ad-Dimaqratiyah wa at-Ta'addudiyah wal-Maar'ah wa Khairul Muslimin*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Sainul, Ahmad, *Undang-Undang Mahar Pakistan ditinjau dari Fiqih Munakahat*, <http://notesnasution.blogspot.co.id/2014/12/ahmad-sainul-mahar-pakistan.html> (online 29 Maret 2016).
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Umar, Nasaruddin, *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara Muslim*, h. 11. disampaikan pada acara Seminar Nasional Hukum Materil Peradilan Agama, antara cita, realita dan harapan, Hotel Red Top Jakarta 19 Februari 2010, lihat <http://dokumen.tips/documents/makalah-dirjen-bimas-islam-hukum-keluarga-kontemporer-di-negara-muslim.html> (online 29 Maret 2016)
- Wikipedia, *Pakistan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan> (online 11 April 2016).
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Yudistiawan, Rahmat, "*Hukum Keluarga Islam di Pakistan*",
<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/hukum-keluarga-islam-di-pakistan/> (online 29 Maret 201